



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RUSMAN HADI**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **70210**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.325.000.000

1. Tanah Seluas 482 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 182 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 548 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 800.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/45 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
6. Bangunan Seluas 32 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 8269 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah Seluas 22000 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 505.000.000

1. MOBIL, HONDA ODYSSEY MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 210.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO B3B A/T Tahun 2019, HADIAH Rp.
6.000.000



3. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
289.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 747.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.913.770.648

F. HARTA LAINNYA Rp. 192.331.500

Sub Total Rp. 6.683.602.148

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.683.602.148

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.